

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati**

Oleh

REIHA DYAH DEWINDRA

(14020111120024)

**Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedharto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Arrangement of small and medium enterprise is a spatial palling set out in Perda Kota Semarang N0. 13 Th. 2013 is motivated by the urge to maintain the function and small-medium enterprise development in Semarang. The purpose if this study is to determine the policy implementation process structuring small-medium enterprise development in sub Gunung Pati using grounding Perda Kota Semarang No. 13 Thn. 2013 on spatial planning Semarang. The result of this study aims to find supporting factors and obstacles that faced by the government in maintaining the function of small-medium enterprise development throught empowerment activities. In this study, researches used the theory of effective implementation of Riant Nugroho to see the implementation process ang implementation of the theory of Van Meter and Van Horn to determine the factors that encourage and hinder the implementation of the policy. This study used qualitatived methods, that using informan from the Dinas Koperasi dan UMKM Semarang, Kecamatan Gunung Pati, and society of sub Gunung Pati itself.

The result of this study indicate that the implementation of small- medium enterprise development in sub Gunung Pati. Starting from planning, and controlling. Spacious members of small-medium enterprise in the sub Gunung Pati at 2015 amounted 15% of the total members. Factors that encourage and inhibit this policy is the size and purpose of the policy resources, dispotion implementator, communication between organization, and the economic environment,

social and political. This study formulated by a few suggestion that may help the local government in Semarang in policy implementation arrangement of small-medium enterprise development in the sub Gunung Pati.

Key Note : Policy Implementation, Small and Medium Enterprise, Development

I. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan bagian yang penting dari perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Jumlahnya yang banyak dan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia memberikan kemudahan dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia, karena pada umumnya UMKM tidak memerlukan kualifikasi pendidikan tertentu dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga kontribusi UMKM dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Dengan peran yang dimiliki UMKM ini membuat pemerintah terus berupaya agar UMKM di Indonesia semakin berkembang seperti pembinaan usaha, pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja, dan fasilitas kemudahan dalam permodalan usaha. Terdapat beberapa alasan mengapa keberadaan UMKM sangat penting Pertama, UMKM berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional. Kedua, saat terjadi krisis moneter 1998 dan krisis 2008-2009 sebesar 96% UMKM tetap bertahan dari guncangan krisis. UMKM juga sangat membantu negara/ pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang 2 dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Ketiga, UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

Untuk menumbuhkembangkan usaha mikro diperlukan peran dari pemerintah pusat maupun daerah secara berkesinambungan. Dimulai dari pelatihan yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro, bantuan modal dan kredit yang diberikan pemerintah, bantuan pemasaran produk, dan lain sebagainya. Namun usaha mikro ini tidak terlepas dari berbagai masalah. Hadiyati

(2010) menyatakan bahwa, survei dari BPS mengidentifikasi berbagai kelemahan dan permasalahan yang dihadapi UMKM berdasarkan prioritasnya, yaitu meliputi: (a) kurangnya permodalan (b) kesulitan dalam pemasaran, (c) persaingan usaha yang ketat, (d) kesulitan bahan baku, (e) kurang teknis produksi dan keahlian, (f) kurangnya keterampilan manajerial (SDM), dan (g) kurangnya pengetahuan dalam masalah manajemen khususnya bidang keuangan dan akuntansi.

Pemberdayaan UMKM merupakan suatu penopang eksistensi suatu usaha untuk tetap berdiri secara berkelanjutan di tengah persaingan dengan usaha bisnis lainnya. pemberdayaan UMKM mengindikasikan bagaimana suatu badan usaha atau organisasi bisnis mampu berkompetisi dengan usaha lain yang sejenis ataupun non sejenis dengan memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya untuk menarik perhatian konsumen. Dalam upaya memenangkan persaingan maka suatu usaha bisnis harus memiliki strategi persaingan yang berbeda dengan strategi yang dilakukan oleh usaha saingannya. Penerapan strategi persaingan sangat diperlukan dalam meraih pangsa pasar dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan dan keunggulan-keunggulan dari perusahaan sejenis.

Faktor internal sangat berpengaruh pada tingkat produktivitas dan inovasi perusahaan. Faktor internal ini meliputi kualitas sumber daya manusia (human resource), budaya perusahaan, latar belakang pendidikan pemilik dan pekerja serta karakter pemangku kepentingan dalam perusahaan. Sedangkan faktor eksternal juga mempengaruhi dan mendukung daya saing UMKM. Faktor tersebut antara lain kemudahan berusaha di Indonesia (*ease of doing business*), akses finansial dan permodalan, akses pasar, infrastruktur, dan kondisi makroekonomi secara umum. Kendala-kendala tersebut menyebabkan UMKM Indonesia dipandang belum berdaya saing tinggi untuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta pendapatan masyarakat. Skala usaha, produktivitas dan tingkat penerapan teknologi merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya saing UMKM. Ketiga faktor tersebut dapat digunakan untuk mengukur daya saing UMKM

Dari uraian tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dari program pelatihan yang dijalankan di Kecamatan Gunungpati melalui pemberdayaan UMKM. Serta untuk menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Semarang yang ditunjukkan bagi masyarakat di lingkungan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

II. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, sedangkan tujuan dari penelitian kualitatif ialah bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai strategi pemerintah daerah dan pelaku usaha (UMKM) dalam meningkatkan daya saing UMKM di Semarang dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pendekatan kuantitatif ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi mendalam kepada informan seperti pemerintah daerah dan pelaku UMKM di Semarang. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah daerah di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang serta anggota binaan UMKM di kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

III. Hasil dan Pembahasan

Program pemberdayaan UMKM telah sesuai dan berpedoman pada peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Program pemberdayaan telah sesuai karena dalam membuat dan menjalankan program pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM kota Semarang telah berpedoman pada pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang beberapa aspek yang ada dalam proses pemberdayaan yaitu sebagai berikut :

- a.** pengembangan sumber daya manusia;
- b.** pembiayaan dan penjaminan;
- c.** produksi dan produktifitas;
- d.** kemitraan dan jejaring usaha;
- e.** fasilitasi perizinan dan standarisasi; dan
- f.** pemasaran.

Dinas koperasi dan UMKM Kota Semarang belum secara keseluruhan dapat menjalankan setiap aspek secara maksimal yang ada dalam penjelasan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013, namun program-program yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang telah sesuai dengan pasal tersebut.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dilaksanakan dengan tujuan tercapainya pengembangan sumber daya manusia seperti yang terdapat pada pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut :

- a. membangun budaya kewirausahaan;
- b. menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan
- c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

Hasil Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

aspek yang ada dalam proses pemberdayaan yaitu sebagai berikut :

- a. pengembangan sumber daya manusia;

Pengembangan sumber daya manusia menjadi aspek yang utama, oleh karena itu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang untuk mewujudkan meningkatnya sumber daya manusia di Kecamatan Gunungpati dilakukan dengan diadakannya pelatihan – pelatihan yang diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Gunungpati. Dalam kegiatan pelatihan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang juga memberikan beberapa ilmu mengenai kesiapan individu untuk memulai menjadi pengusaha atau bagian dari anggota UMKM. Pelatihan kepada masyarakat diberikan melalui data dari kecamatan dan dilakukan secara bergiliran tiap tahunnya.

b. pembiayaan dan penjaminan;

Sumber pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Pemerintah Kota Semarang tentang APBD yaitu Perda no 1 tahun 2013, Peraturan Walikota no 2 tahun 2013 tentang APBD, Perda no 12 tahun 2013 tentang APBD tahun anggaran 2014 dan Peraturan Walikota no 41 tahun 2013 tentang penjelasan APBD 2014. Dimana setiap pembiayaan atas kegiatan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang diperoleh dari dana APBD Kota Semarang dan dijalankan dengan sebaik – baiknya teruntuk kemajuan anggota UMKM.

Kecamatan Gunungpati memperoleh pembiayaan dalam bentuk pemberian pelatihan kepada anggota UMKM dan masyarakat yang dibina untuk dapat menjadi bagian dari kemajuan UMKM. Pelatihan diberikan dua kali dalam kurun waktu 1 tahun, masing – masing pelatihan dilaksanakan selama 3 hari dan diberikan kepada 30 Orang warga masyarakat di Kecamatan Gunungpati serta anggota UMKM Kecamatan Gunungpati.

c. produksi dan produktifitas;

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang memberikan fasilitas yang sangat banyak bagi anggota UMKM yang ingin terus berkembang atau mengembangkan usahanya menjadi lebih besar dan baik lagi terutama untuk para anggota UMKM di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Dengan diberikannya fasilitas bantuan berupa alat – alat produksi, pinjaman modal dari koperasi, bantuan kelayakan uji makanan, dan lain – lain. Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas tambahan tersebut dengan tujuan dapat meningkatkan hasil produksi dari anggota UMKM di Kecamatan Gunungpati. Produktifitas para anggota UMKM yang terus meningkat dapat mewujudkan tujuan pemerintah yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat anggota UMKM menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

d. kemitraan dan jejaring usaha;

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang telah menjalin kerjasama dengan beberapa dinas lain di Kota Semarang, dan telah turut serta mengikut sertakan anggota UMKM di Kecamatan Gunungpati khususnya dalam beberapa event yang telah diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

Anggota UMKM di Kota Semarang khususnya di Kecamatan Gunungpati telah ikut berpartisipasi sebagaimana dalam acara pameran atau expo di dalam kota ataupun luar kota Semarang yang telah diadakan oleh Dinas Koperasi Kota Semarang sebagai wujud perluasan jaringan dagang untuk para anggota UMKM binaannya.

e. fasilitasi perizinan dan standarisasi; dan

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dalam pelaksanaannya juga memberikan fasilitas pendukung kepada para anggota binaannya untuk membantu mempermudah perolehan perizinan yang sesuai standart agar produk – produk dari anggota UMKM dapat diterima disemua kalangan masyarakat.

Contoh yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang adalah membantu anggota UMKM secara bergiliran untuk membuat fasilitas perizinan seperti setifikasi halal untuk produk makanan dan minuman UMKM, kemudian bantuan proses izin pengurusan pendaftaran produk ke BPPOM, dan juga fasilitas perizinan lainnya yang dijadikan sebagai peningkatan dari mutu dan kualitas hasil dari produksi anggota UMKM.

f. pemasaran.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang juga telah memberikan anggotanya bantuan dalam hal pemasaran. Hasil dari produksi tiap anggota UMKM diberikan fasilitas pemasaran pada

beberapa acara yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM ataupun dinas lain di Kota Semarang. Acara bazar dalam hari – hari tertentu di Kota Semarang dijadikan media pemasaran khususnya kepada anggota UMKM. Seperti contoh untuk para anggota binaan UMKM di Kecamatan Gunungpati, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Semarang untuk menyelenggarakan pasar buah pagi di kebun buah cepoko milik Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Semarang, para anggota UMKM Kecamatan Gunungpati dapat menjajakan produk – produknya di pasar buah pagi tersebut yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan dari dalam ataupun luar Kota Semarang.

Faktor Pendorong dan Penghambat dalam proses Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan UMKM

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi yang berhasil dikarenakan implementor yakni Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mengetahui apa yang harus dilakukannya. Dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati ini, implementor telah mengetahui ukuran, tujuan dan sasaran dari kebijakan pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati ini.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati sangat tergantung dari kemampuan implementor dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada seperti sumberdaya manusia, ketersediaan data pendukung implementasi, Sarana prasarana pemerintah serta sumberdaya finansial.

c. Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Dinas Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM dalam hal ini sebagai fasilitator, regulator, dan motivator dalam pembuatan kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM karena sesuai dengan TUPOKSI yang ada. Dalam formulasi kebijakan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM dibantu oleh banyak pihak. Dalam hal ini, pihak lain yang terlibat dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM adalah BAPPEDA, DPRD, kepala desa, kecamatan, dan masyarakat termasuk di dalamnya pelaku UMKM.

Sesuai dengan tupoksi yang ada, Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran dalam hal melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan, pembinaan baik dari sisi kelembagaan dan pengendalian dalam bidang koperasi dan UKM. Jadi yang memiliki inisiatif atau yang menjadi leader dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM adalah Dinas Koperasi dan UKM.

d. Disposisi Implementor

Implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati, implementor sudah mendukung kebijakan tersebut dengan mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik dan mereka cepat tanggap setiap ada permasalahan yang muncul dalam proses implementasi pemberdayaan UMKM ini.

e. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Lingkungan perusahaan tidak hanya konsumen, namun juga karyawan, kreditur, lembaga keuangan serta pemerintah. Oleh karena itu unsur-unsur dalam modal sosial perlu diterapkan dalam aktivitas bisnis bagi perusahaan yang bersangkutan. Keberhasilan suatu usaha bisnis

sangat ditentukan oleh manajer, dengan demikian fungsi dan peran manajer terlebih-lebih terhadap para karyawan sebagai bawahan perlu memperlakukannya secara manusiawi.

IV. Kesimpulan

Proses implementasi program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM di Kota Semarang, namun belum mendalami keseluruhan dari aspek – aspek yang ada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tersebut karena dalam mengimplementasikan program masih terdapat beberapa kekurangan. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang belum mampu menjalankan program dengan maksimal karena masih banyak anggota-anggota umkm yang belum mendapatkan pelatihan. Hasil implementasi program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang belum baik karena masih banyak kendala-kendala yang belum dapat diselesaikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang seperti perluasan pemasaran, perluasan pendanaan, ketersediaan bahan baku yang terbatas dan sulit didapatkan, harga bahan baku yang tinggi, alat-alat yang kurang memadai dan sarana atau tempat promosi yang belum tersedia untuk semua anggota umkm di Kecamatan Gunungpati.

Peningkatan pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dapat lebih ditingkatkan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menjalin Hubungan (Networking)
- b. Mendidik Tenaga Terampil (Mentor)
- c. Time Management
- d. Sistem Kontrol (Pendataan)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurofiq, Atep. 2014. Menakar Pengaruh Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 terhadap pembangunan Indonesia. *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Volume 1, Hal 250-256.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Ashariyadi. 2016. Mewujudkan UMKM Berdaya Saing di Era MEA. *Majalah Masyarakat Asean* Edisi 12.
- Bank Indonesia. Pemetaan Dan Strategi Peningkatan Daya Saing Umkm Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 Dan Pasca MEA 2025. Diakses dari www.bi.go.id, pada tanggal 10 Juni 2017
- Binarto, Raymond., dan Ardianti, Retno. 2013. Analisis Modal Sosial dan Entrepreneurial Leadership pengusaha Mikro dan Kecil di Jawa Timur. *AGORA* Volume 1, No. 3, 2013. hlm. 65-71
- Dinda Audriene mutmainah. Kontribusi UMKM terhadap PDB Tembus Lebih Dar 60 Persen, CNN Indonesia, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen/> diakses pada tanggal 10 Juni 2017
- Hasan, M. Iqba. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Hapsari, Pradnya Paramita., dan Hakim, Abdul., Soeaidy, Saleh. 2014. “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu)” *Wacana*, Vol. 17, No. 2.

- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Ekonomika Industri Indonesia : Menuju Negara Industri Baru 2030*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007)
- LPPI dan BI. 2015. “Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”. Diakses dari www.bi.go.id, pada tanggal 10 Juni 2017
- Moleong J.Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakary Offset.
- Salamah, Lilik. 2001. *Lingkaran Krisis Ekonomi Indonesia Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Edisi XIV.
- Sari, Yunita Resmi., Noviasono, Anas, Titik., dan Paramitha, Fadila. 2016. “Pemetaan dan Strategi Peningkatam daya saing UMKM dalam menghadapi MEA 2015 dan Pasca MEA 2025”. Working Paper Bank Indonesia
- Sudaryanto, Ragimun, dan Wijayanti, Rahma Rina. *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*. Diakses dari www.kemenkeu.go.id pada tanggal 10 Juni 2017.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Susilo, Y. Sri. 2010 “Strategi Meningkatkan Daya Saing Umkm Dalam Menghadapi Implementasi Cafta Dan MEA”. *Buletin Ekonomi*, Volume. 8, No. 2, Agustus 2010, hlm. 70-170
- Tambunan, T. T. H. *Ukuran Daya Saing Koperasi dan UKM*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Diakses dari <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-3000-21072008.pdf>, pada tanggal 10 Juli 2017.